

# Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah

Anisa Sepina Ulfa<sup>1</sup>, Romlah<sup>2</sup>, Ahmad Fauzan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; annisasepina@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; romlah@radenintan.ac.id

<sup>3</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; ahmad.fauzan@radenintan.ac.id

## ARTICLE INFO

### Keywords:

zoning policy;  
CIPP model;  
education evaluation

### Article history:

Received 2024-10-22

Revised 2024-11-28

Accepted 2024-12-21

## ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the zoning system in public junior high schools in Central Lampung Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model. The research method used is qualitative with interview, observation, and documentation techniques conducted at SMPN 1 Terbanggi Besar and SMPN 1 Terbanggi Besar. Evaluation results show that in the context aspect, SMPN 1 is supported by a strategic location and adequate facilities, while SMPN 3 faces challenges due to its remote location and limited facilities. remote location and limited facilities. On the input aspect, SMPN 1 has better facilities and human resources than SMPN 3. On the process aspect, SMPN 1 managed to implement the zoning procedures effectively, although administrative administrative challenges remained, while SMPN 3 faced low interest from applicants. The product aspect showed that the zoning system in SMPN 1 helps to equalize education, while SMPN 3 needs more efforts to attract community interest.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



## Corresponding Author:

Anisa Sepina Ulfa

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; annisasepina@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan ini, pemerintah harus terus melakukan perbaikan di seluruh aspek pendidikan, salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan mutu pendidikan, yang mencakup aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. Padahal, pendidikan merupakan amanat UUD 1945 sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Wulakada, 2024).

Salah satu indikasi ketimpangan tersebut adalah keberadaan sekolah-sekolah yang diberi label "favorit" atau "unggulan" di berbagai daerah. Sekolah-sekolah ini sering kali mendapatkan fasilitas terbaik, tenaga pendidik berkualitas, serta prioritas dalam berbagai kegiatan pendidikan, yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lainnya (Arif, 2020). Hal ini berakibat hanya siswa dengan kemampuan akademik tinggi atau status ekonomi tertentu yang dapat mengakses sekolah-sekolah favorit atau

unggulan tersebut sehingga ini dapat menciptakan ketimpangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi, mendukung asas keadilan sosial, dan menghilangkan stigma antara sekolah favorit dan non-favorit. Sistem zonasi mewajibkan sekolah menerima siswa berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dengan persentase tertentu untuk memprioritaskan siswa dalam radius terdekat. Namun, dalam implementasinya justru sistem zonasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah, tidak diwajibkan menerapkan sistem zonasi, sehingga pelaksanaannya belum seragam di semua lembaga pendidikan. Selain itu, kesenjangan fasilitas dan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini (Hayanuddin, Parawangi, & Syukri, 2024).

Di Kabupaten Lampung Tengah, kebijakan zonasi memberikan hasil yang beragam. Contohnya, SMP Negeri 1 Terbanggi Besar telah mampu menerapkan sistem zonasi dengan baik, sedangkan SMP Negeri 3 Gunung Sugih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya minat masyarakat setempat. Data berikut menunjukkan perbandingan antara kedua sekolah:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Murid di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah (Tahun Ajaran 2021/2022, Semester Ganjil)**

Nama Sekolah	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Jumlah	Akreditasi
SMP Negeri 1 Terbanggi Besar	373	373	746	A
SMP Negeri 3 Gunung Sugih	35	37	72	C

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah siswa dan mutu pendidikan antara kedua sekolah adanya Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di daerah tersebut masih perlu ditingkatkan.

Maka merujuk pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah melalui penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah.”**

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian evaluatif berbasis model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian dilakukan di dua sekolah di Kabupaten Lampung Tengah (SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih) selama dua bulan pada semester ganjil. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian kepala sekolah, panitia PPDB, dan staf sekolah. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan zonasi PPDB di tiga sekolah tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini mengevaluasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Lampung Tengah dengan pendekatan model CIPP melalui wawancara, observasi, dan analisis data naratif. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih, mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk kebijakan zonasi, berdasarkan data yang diperoleh dari kepala sekolah, Waka Kurikulum, dan ketua PPDB pada 30 September–3 Oktober 2024. Hasil analisis ini disusun untuk memberikan

kesimpulan yang mendukung evaluasi dan verifikasi kebijakan sistem zonasi di kedua sekolah tersebut, berikut hasil evaluasi di SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih:

Pada sekolah SMPN 1 Terbanggi Besar, evaluasi konteks menunjukkan bahwa kebijakan zonasi sesuai tujuan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dengan akses pendidikan merata. Lingkungan sekolah strategis dan fasilitas memadai, meskipun kebijakan ini tidak berdampak signifikan karena mayoritas siswa sudah berasal dari wilayah sekitar, dilihat dari sisi input, fasilitas sekolah cukup lengkap, tetapi ada kebutuhan penambahan ruang kelas. Proses PPDB berjalan lancar dengan sistem aplikasi online, meski terdapat kendala teknis verifikasi data. Produk kebijakan menciptakan keragaman siswa, tetapi guru menghadapi tantangan menyesuaikan metode pengajaran untuk tingkat kemampuan siswa yang beragam.

Sebaliknya di sekolah SMPN 3 Gunung Sugih menghadapi tantangan berbeda. Lokasi terpencil membuat kebijakan zonasi kurang efektif karena minat pendaftaran siswa rendah. Fasilitas sekolah sangat terbatas, dengan ruang kelas kurang layak dan minim laboratorium. Proses PPDB terganggu oleh kurangnya sosialisasi dan verifikasi data untuk siswa dari lokasi jauh. Produk kebijakan zonasi tidak signifikan meningkatkan jumlah siswa, sehingga sekolah sulit memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.

Kedua sekolah menunjukkan variasi implementasi dan dampak kebijakan zonasi berdasarkan kondisi lingkungan dan fasilitas masing-masing. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan dari lapangan dengan pihak terkait kebijakan sistem zonasi tanpa mengubah hasil wawancara tersebut, berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan terkait juknis PPDB untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, berikut tabel terkait juknis PPDB tersebut:

**Tabel 1**  
**Juknis PPDB Lampung Tengah**

<b>Aspek</b>	<b>Isi</b>
<b>Kebijakan Terkait</b>	Peraturan Bupati Lampung Tengah No 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
<b>Azas Kebijakan</b>	Nondiskriminatif/Menerima semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang, kecuali sekolah khusus.\n- Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan.
<b>Tujuan Sistem Zonasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses pendidikan yang merata.</li> <li>• Mendekatkan peserta didik dengan sekolah sesuai domisili.</li> <li>• Menghilangkan diskriminasi dalam PPDB.</li> </ul>
<b>Penerapan Zonasi</b>	Kuota zonasi minimal 90% dari daya tampung sekolah.\n- Berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili.
<b>Kriteria Seleksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.</li> <li>• Tidak dilakukan tes akademik untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP.</li> </ul>
<b>Manfaat Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.</li> <li>• Mengurangi kompetisi antar-sekolah yang berlebihan.</li> <li>• Menjamin hak pendidikan anak.</li> </ul>
<b>Hambatan dalam Implementasi Solusi Alternatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya infrastruktur jaringan internet untuk pelaksanaan daring.</li> <li>• Tidak semua orang tua memahami sistem zonasi dengan baik.</li> <li>• Penyediaan mekanisme luar jaringan (luring) bagi daerah tanpa akses internet.</li> <li>• Sosialisasi kebijakan zonasi kepada masyarakat.</li> </ul>
<b>Sanksi dalam Kebijakan</b>	Sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar ketentuan, termasuk larangan menambah rombongan belajar atau ruang kelas baru tanpa izin.

---

**Kesimpulan Awal** Sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk pemerataan pendidikan, namun perlu perbaikan dalam implementasi dan pengawasan.

---

*Sumber: Perbup. No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.*

Selanjutnya, hasil penelitian dengan wawancara bersama Informan di lapangan yang dilakukan di SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih Lampung Tengah terhadap 4 indikator diatas sebagai berikut:

### 1. SMPN I Terbanggi Besar Lampung Tengah

Dalam wawancara terkait 4 indikator ini, wawancara dilakukan bersama beberapa responden, di antaranya, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum Sekolah, Panitia PPDB dan terakhir Wali Murid SMPN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah.

#### a. Evaluasi Konteks

Kebijakan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan sesuai Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Kepala sekolah dan panitia PPDB menjelaskan bahwa zonasi memastikan siswa dapat mengakses sekolah terdekat, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan menciptakan keragaman siswa. Namun, untuk SMPN 1 Terbanggi Besar, zonasi dianggap kurang urgen karena siswa mayoritas sudah berasal dari sekitar sekolah. Kepala Sekolah SMPN 1 Terbanggi Besar dalam wawancaranya mengungkapkan "Kebijakan PPDB zonasi ini diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan memastikan setiap peserta didik dapat mengakses sekolah terdekat di lingkungan mereka, dan dengan adanya zonasi, kami berharap ada pemerataan pendidikan, di mana siswa dari semua latar belakang dapat mengenyam pendidikan yang setara. Kemudian, panitia PPDB menjelaskan terkait latar belakang Sistem Zonasi "bahwa yang melatar belakangi dari kebijakan zonasi ini adalah adanya peraturan Kementerian Pendidikan yang, yaitu Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menekankan pemerataan akses pendidikan. Kami bertanggung jawab memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon siswa di Lampung Tengah.

#### b. Evaluasi Input

Sekolah menyediakan fasilitas cukup baik, seperti ruang kelas dan perlengkapan, meski ada kebutuhan perbaikan fasilitas dan tambahan ruang. Sistem PPDB online digunakan untuk verifikasi jarak zonasi yang ditentukan melalui rapat MKKS. Biaya pendaftaran digratiskan, dan buku disuplai pemerintah. Namun, ada biaya opsional untuk seragam tertentu. Panduan proses PPDB perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Membahas terkait penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada zonasi, Berdasarkan hasil wawancara tentang komponen Input lainnya bersama veni yang merupakan Waka Kurikulum SMPN 1 Terbanggi Besar, terkait apakah sekolah sudah menerapkan sistem zonasi sesuai dengan prosedur atau juknis dari pemerintah daerah, ia menyatakan "Pihak SMPN 1 Terbanggi Besar sudah menerapkan sistem zonasi sesuai dengan prosedur dari pemerintah", kemudian veni juga menjelaskan terkait dengan batasan jalur zonasi antara sekolah satu dan lainnya, ia menyatakan "Untuk jarak, sebelum penerimaan PPDB diadakan rapat kepala sekolah, sub rayon, MKKS dan Dinas. Jadi, setiap sekolah mengajukan jarak yang sesuai dengan sekolah masing-masing. SMP1 mengajukan beberapa desa, berikut data wilayah zonasi di SMPN 1:

**Tabel 2**  
**Data Wilayah Zonasi PPDB SMPN 1 Terbanggi Besar**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun
1	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Yukum Jaya	Dusun/Lingkungan 1
				Dusun/Lingkungan 2
				Dusun/Lingkungan 3
				Dusun/Lingkungan 4
				Dusun/Lingkungan 5
				Dusun/Lingkungan 6
				Dusun/Lingkungan 7
				Dusun/Lingkungan 8
				Dusun/Lingkungan 9
				Dusun/Lingkungan 10
2	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Dusun/Lingkungan 11
				Dusun/Lingkungan 12
				Dusun/Lingkungan 13
				Dusun/Lingkungan 14
				Dusun/Lingkungan 15
				Dusun/Lingkungan 16
				Dusun/Lingkungan 17
				Dusun/Lingkungan 18
				Dusun/Lingkungan 19
				Dusun/Lingkungan 20
				Dusun/Lingkungan 1
				Dusun/Lingkungan 2
				Dusun/Lingkungan 3
				Dusun/Lingkungan 4
				Dusun/Lingkungan 5
				Dusun/Lingkungan 6
				Dusun/Lingkungan 7
				Dusun/Lingkungan 8
				Dusun/Lingkungan 9
				Dusun/Lingkungan 10
3	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Poncowati	Dusun/Lingkungan 11
				Dusun/Lingkungan 12
				Dusun/Lingkungan 13
				Dusun/Lingkungan 14
				Dusun/Lingkungan 15
				Dusun/Lingkungan 16
				Dusun/Lingkungan 17
				Dusun/Lingkungan 18
				Dusun/Lingkungan 19
				Dusun/Lingkungan 20

Sumber: ppdblampungtengahkab

### c. Evaluasi Proses

Pelaksanaan PPDB sesuai jadwal dengan sosialisasi kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi verifikasi administrasi dan kurangnya pemahaman wali murid tentang prosedur. Kelebihan siswa dalam rombel diatasi dengan pengalihan ke sekolah lain. Kebijakan zonasi tidak membedakan siswa berdasarkan prestasi, yang menjadi tantangan bagi guru untuk menyesuaikan

metode pengajaran. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Sekolah, terkait dengan Pelaksanaan dan Tantangan dalam Kebijakan Zonasi, ia menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini, kami mengupayakan agar semua prosedur berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, Kami melakukan sosialisasi kepada calon siswa dan wali murid, namun masih ada tantangan terkait pemahaman akan prosedur ini di masyarakat”, kemudian Berdasarkan hasil wawancara bersama Veni selaku Waka kurikulum SMPN 1 Terbanggi Besar, terkait dengan apakah pelaksanaan sistem zonasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ia menyatakan bahwa “sejauh ini sudah, kami selalu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh dinas”, lebih lanjut ia menjelaskan terkait apakah ada jumlah siswa yang diterima melebihi rombongan belajar, ia menyatakan “Jika siswa melebihi rombongan belajar bisa dipindahkan ke sekolah lain. Kelebihan rombongan belajar bisa dilihat di aplikasi sehingga sangat bisa untuk memindahkan siswa ke sekolah yang masih mempunyai kuota. Atau bisa juga menambah rombongan belajar dengan mengajukan ke dinas untuk penambahan rombongan belajar jika siswa yang belum masuk sekolah ini adalah dari lingkungan jalur zonasi, dengan syarat sekolah masih memiliki ruang kelas kosong dan tenaga pendidik yang cukup Waka Kurikulum SMPN 1 Terbanggi Besar, “‘Evaluasi Sistem Zonasi’, Wawancara.

#### d. Komponen Produk

Kebijakan zonasi meningkatkan akses siswa dari berbagai wilayah dan membantu pemerataan pendidikan. Label "sekolah favorit" mulai memudar karena seleksi berbasis lokasi. Sekolah tetap menjaga kualitas pendidikan dan melarang diskriminasi ekonomi melalui aturan seragam. Guru menghadapi tantangan beragamnya karakter siswa. Veni mengusulkan peningkatan proporsi jalur prestasi untuk keseimbangan. Veni, selaku Waka Kurikulum SMPN 1 Terbanggi Besar, penerapan sistem zonasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek sekolah, ia mengatakan dengan adanya sistem ini, label "sekolah favorit" di SMPN 1 mulai memudar karena seleksi tidak lagi berbasis prestasi akademik, melainkan lokasi zonasi. Ia mengusulkan agar persentase untuk jalur prestasi diperbesar sehingga ada keseimbangan antara jalur zonasi dan jalur lainnya, seperti jalur prestasi, untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa berprestasi di luar zona terdekat Waka Kurikulum SMPN 1 Terbanggi Besar, “‘Evaluasi Sistem Zonasi’, Wawancara. Berikut Tabel terkait jumlah pendaftar:

**Tabel 3**  
**Jumlah Pendaftar SMPN 1 Terbanggi Besar Tahun 2020/2021**

Kategori Jalur	Kuota	Pendaftar	Terverifikasi	Belum Terverifikasi	Diterima	Sisa Kuota
Jalur Afirmasi	52	35	35	0	35	17
Jalur Zonasi	128	116	116	0	116	12
Jalur Mutasi	12	2	2	0	2	10
Jalur Prestasi	64	31	31	0	31	33
Total	256	184	184	0	184	72

#### Keterangan:

1. Jalur zonasi memiliki jumlah pendaftar tertinggi (116 siswa), menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menjangkau siswa di wilayah sekitar.
2. Jalur prestasi, meskipun memiliki kuota besar (64 siswa), hanya terisi setengahnya, mendukung usulan evaluasi peningkatan daya tarik jalur ini.
3. Sisa kuota menunjukkan potensi untuk penyesuaian dalam distribusi kuota agar lebih optimal.

## 2. SMPN 3 Gunung Sugih Lampung Tengah

### a. Komponen Konteks

Berdasarkan wawancara, kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih tidak berdampak signifikan pada peningkatan jumlah siswa. Sebagian besar calon siswa memilih sekolah lain, baik di Punggur maupun sekolah swasta, yang dianggap memiliki kualitas dan fasilitas lebih baik. Minimnya peminat menyebabkan sekolah ini kurang mendapat prioritas dalam penyediaan fasilitas dari pemerintah. Namun, zonasi memberikan akses lebih dekat bagi siswa lokal, meskipun daya tarik sekolah masih rendah dibandingkan sekolah lain. Kepala sekolah juga menyebutkan visi sekolah mendukung kebijakan ini, tetapi urgensinya kurang relevan di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara terkait dengan kebijakan PPDB Sistem Zonasi. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa “meskipun kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun di SMPN 3 Gunung Sugih, kebijakan ini justru tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah siswa. Sebagian besar calon siswa tetap memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah yang ada di Punggur atau sekolah swasta lainnya, yang dianggap memiliki kualitas atau fasilitas lebih baik”. Panitia PPDB juga menyatakan bahwa “penerapan zonasi di wilayah ini kurang efektif dalam menarik minat peserta didik lokal untuk bersekolah di SMPN 3 Gunung Sugih.” Berikut data wilayah yang masuk dalam zonasi SMPN 3 Gunung Sugih:

**Tabel 4.4**  
**Data Wilayah Zonasi PPDB SMPN 3 Gunung Sugih**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun
1	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Gunung Sugih Raya	Dusun/Lingkungan 9 Dusun/Lingkungan 10
2	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Buyut Udik	Dusun/Lingkungan 1 Dusun/Lingkungan 2 Dusun/Lingkungan 3 Dusun/Lingkungan 4 Dusun/Lingkungan 5 Dusun/Lingkungan 6
3	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Putra Buyut	Dusun/Lingkungan 1 Dusun/Lingkungan 2 Dusun/Lingkungan 3 Dusun/Lingkungan 4 Dusun/Lingkungan 5
5	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Buyut Ilir	Dusun/Lingkungan 1 Dusun/Lingkungan 2 Dusun/Lingkungan 3 Dusun/Lingkungan 4 Dusun/Lingkungan 5 Dusun/Lingkungan 6 Dusun/Lingkungan 7
6	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Buyut Utara	Dusun/Lingkungan 1 Dusun/Lingkungan 2 Dusun/Lingkungan 3 Dusun/Lingkungan 4 Dusun/Lingkungan 5
7	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Bangun Rejo	Dusun/Lingkungan 1

---

Dusun/Lingkungan 2  
Dusun/Lingkungan 3  
Dusun/Lingkungan 4  
Dusun/Lingkungan 5

---

*Sumber: ppdblampungtengahkab*

### **b. Komponen Input**

Fasilitas di SMPN 3 Gunung Sugih masih terbatas, termasuk laboratorium, buku penunjang, dan infrastruktur lainnya. Prosedur PPDB mengikuti juknis pemerintah, tetapi pendaftaran offline tetap digunakan untuk membantu wali murid yang kesulitan dengan sistem online. Buku pedoman dari dinas pendidikan dianggap kurang relevan untuk kebutuhan sekolah ini. Meskipun tidak ada biaya pendaftaran, beberapa seragam khas tetap memerlukan kesepakatan biaya dengan orang tua murid. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Gunung Sugih, untuk ketersediaan fasilitas Kepala Sekolah menyatakan bahwa "fasilitas yang tersedia di SMPN 3 Gunung Sugih terbatas dan belum cukup memadai untuk mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Minimnya jumlah siswa juga membuat alokasi dana dan perhatian terhadap fasilitas menjadi lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah yang memiliki lebih banyak siswa". Kemudian terkait Ketersediaan Buku Pedoman Panitia PPDB menyebutkan bahwa "buku pedoman yang diberikan oleh dinas pendidikan kurang mampu menjawab kebutuhan spesifik sekolah seperti SMPN 3 Gunung Sugih yang memiliki jumlah siswa sedikit.

### **c. Komponen Proses**

Pelaksanaan PPDB berjalan lancar secara teknis, namun hasilnya tidak efektif. Rendahnya minat siswa menjadi hambatan utama, meski panitia telah melakukan promosi di lingkungan sekitar. Jumlah siswa yang diterima tidak memenuhi kapasitas rombel, sehingga banyak kursi kosong. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman wali murid tentang prosedur online. Semua siswa diterima tanpa seleksi, tetapi karakter siswa yang beragam menuntut penyesuaian metode pengajaran. Kepala sekolah menyatakan bahwa "aktivitas pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih berlangsung lancar secara teknis, namun hasilnya kurang efektif". Lebih lanjut terkait hambatan yang ditemui selama pelaksanaan PPDB, kepala sekolah menyatakan bahwa "hambatan utama dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih adalah rendahnya minat masyarakat setempat. Kepala Sekolah juga mengungkapkan bahwa "fasilitas yang terbatas dan persepsi kualitas pendidikan yang rendah membuat banyak orang tua dan siswa memilih sekolah di luar zonasi, panitia PPDB berupaya mencari alternatif dengan melakukan promosi ke lingkungan sekitar, tetapi hasilnya belum memuaskan". Selain itu panitia PPDB juga menyatakan bahwa "meskipun tidak ada kendala besar dalam prosedur pelaksanaan, rendahnya jumlah pendaftar tetap menjadi masalah utama".

### **d. Komponen Produk**

Kebijakan zonasi memberikan dampak positif dalam membuka akses pendidikan bagi siswa lokal, tetapi dampaknya sangat terbatas. Kualitas fasilitas dan program pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi minat siswa. Alumni sekolah ini melanjutkan ke berbagai jenjang, akan tetapi beberapa siswa tidak melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi keluarga. Untuk ke depannya, pihak sekolah sangat berharap kebijakan zonasi dapat lebih efektif, dengan pemerataan siswa di antara sekolah-sekolah terdekat. Hasil wawancara dengan Sutardi selaku Waka Kurikulum SMPN 3 Gunung Sugih, terkait masih adakah label sekolah favorit di SMPN 3 Gunung Sugih ini, ia menjawab bahwasannya "Dulu sekolah kami ramai, namun seiring berjalannya waktu siswa semakin berkurang, ia juga menambahkan terkait adakah kesenjangan sosial antara siswa yang mampu dan kurang mampu, ia menyatakan bahwa "semua siswa disini memiliki latar belakang anak yang kurang mampu dan kebanyakan broken home, sehingga pengangan dalam proses pembelajaran lebih harus maksimal, lalu terkait adakah perbedaan cara mengajar antara siswa yang berprestasi dengan siswa



yang biasa saja, sutardi menyatakan bahwa “semua kami sama ratakan tidak ada yang dibedakan”, kemudian dia juga menjelaskan terkait bagaimana keadaan alumni setelah lulus sekolah, bahwasannya “siswa yang setelah lulus lanjut ke SMA Negeri, SMK, sekolah swasta dan Pondok Pesantren namun ada juga siswa yang tidak melanjutkan sekolah karena broken home, lalu sutardi menambahkan terkait setelah lulus apakah masih mendapatkan prestasi akademik maupun non akademik, ia menjawab “untuk prestasi tidak semua siswa mendapatkan prestasi. Berikut tabel terkait jumlah pendaftar di SMPN 3 Gunung Sugih:

**Tabel 5**  
**Jumlah Pendaftar SMPN 3 Gunung Sugih Tahun 2020/2021**

Kategori Jalur	Kuota	Pendaftar	Terverifikasi	Belum Terverifikasi	Diterima	Sisa Kuota
Jalur Afirmasi	7	7	7	0	7	0
Jalur Zonasi	16	16	16	0	16	0
Jalur Mutasi	1	1	1	0	1	0
Jalur Prestasi	8	0	0	0	0	8
Total	32	23	23	0	23	9

#### Keterangan:

1. Jalur zonasi mendominasi dengan jumlah pendaftar tertinggi (16 siswa), mencerminkan efektivitas zonasi dalam menjangkau siswa lokal.
2. Jalur prestasi tidak terisi sama sekali, menunjukkan perlu adanya strategi untuk meningkatkan daya tarik jalur ini.

#### Pembahasan

Selanjutnya, analisis evaluasi CIPP terkait kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi Konteks Sistem Zonasi

##### a. SMPN 1 Terbanggi Besar

Hasil analisis dengan menggunakan teori evaluasi konteks, terkait konteks kebijakan sistem zonasi di SMPN 1, yang mana evaluasi konteks adalah evaluasi suatu pendekatan dalam evaluasi kebijakan atau program yang berfokus pada pemahaman terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal di mana kebijakan atau program tersebut diterapkan, (Rizky Lestari, Fahmy, & Laily Kusuma Wati, 2024) dengan tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau program sesuai dan efektif dalam lingkungan atau kondisi tertentu (Cahyo Hasanudin, Wagiran, 2021). Kebijakan zonasi berhasil mendukung visi dan misi sekolah serta tujuan nasional pemerataan pendidikan. Kepala sekolah dan Waka Kurikulum menegaskan bahwa zonasi sejalan dengan komitmen sekolah untuk memberikan akses setara kepada seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang, meski demikian sebagian besar siswa berasal dari sekitar lingkungan sekolah, kebijakan ini penting untuk mencegah ketidakadilan akses pendidikan. Dengan fasilitas yang memadai dan lokasi strategis, kebijakan ini dinilai efektif dalam menciptakan pemerataan pendidikan. Dalam teori evaluasi konteks, seperti yang dijelaskan oleh *Stufflebeam* dalam model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*), konteks harus dianalisis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang ada. Konteks yang kurang sesuai dapat menyebabkan kurangnya daya tarik bagi masyarakat sekitar (Rudi Maryati, 2023). Dengan demikian, evaluasi konteks harus mempertimbangkan persepsi masyarakat, reputasi sekolah, dan kualitas layanan yang ditawarkan untuk mencapai tujuan zonasi. Hal ini memungkinkan sekolah menyesuaikan strategi dengan mengatasi persepsi negatif atau kelemahan yang ada, sehingga dapat menarik lebih banyak pendaftar dan meningkatkan efektivitas kebijakan zonasi secara menyeluruh.

Selain itu, evaluasi konteks juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi kebijakan terhadap dinamika lokal, termasuk tantangan yang mungkin timbul (Cintya Lauren, 2023). Dalam implementasi sistem zonasi di SMPN 1. Sebagai contoh, meskipun kebijakan ini mendukung akses pendidikan yang setara, evaluasi mendalam terhadap distribusi siswa dan persepsi publik dapat membantu sekolah mengidentifikasi potensi ketimpangan baru atau kendala yang belum terdeteksi. Dalam hal ini mengakibatkan perlunya keterlibatan aktif masyarakat luas melalui forum diskusi atau survei dapat menjadi pendekatan strategis untuk mengumpulkan umpan balik yang relevan (Rizki, Rafi Aurelian, Ela Liana, Nur Afifah Fadhilah, & Ranasari Bimanti Esthi, 2024). Langkah ini memungkinkan pengelola kebijakan untuk merancang intervensi yang responsif, seperti penyesuaian kriteria zonasi atau peningkatan fasilitas pendukung, sehingga kebijakan semakin optimal dalam mencapai tujuan utamanya.

### **b. SMPN 3 Gunung Sugih**

Peneliti menganalisis dengan menggunakan teori evaluasi konteks, terkait konteks kebijakan sistem zonasi di SMPN 3, yang mana evaluasi konteks adalah evaluasi suatu pendekatan dalam evaluasi kebijakan atau program yang berfokus pada pemahaman terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal di mana kebijakan atau program tersebut diterapkan, (Rizky Lestari et al., 2024) dengan tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau program sesuai dan efektif dalam lingkungan atau kondisi tertentu (Cahyo Hasanudin, Wagiran, 2021). Zonasi kurang efektif dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. Meskipun kebijakan ini memberikan kemudahan bagi siswa lokal untuk mengakses pendidikan, SMPN 3 Gunung Sugih kalah saing dengan sekolah di Punggur atau sekolah swasta yang memiliki fasilitas dan reputasi lebih baik, minimnya fasilitas seperti laboratorium dan buku penunjang, serta lokasi yang kurang strategis, menjadi tantangan utama. Persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah turut berkontribusi pada rendahnya jumlah pendaftar. Dalam teori evaluasi konteks, seperti yang dijelaskan oleh *Stufflebeam* dalam model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*), konteks harus dianalisis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang ada. Konteks yang kurang sesuai dapat menyebabkan kurangnya daya tarik bagi masyarakat sekitar (Rudi Maryati, 2023).

Lebih lanjut peneliti mencatat bahwa evaluasi konteks terhadap kebijakan zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih mengungkapkan perlunya perbaikan pada aspek infrastruktur dan peningkatan reputasi sekolah. Berdasarkan model *CIPP*, analisis konteks menunjukkan bahwa minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium dan bahan ajar, serta lokasi yang kurang strategis, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara memadai (Fernanda et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih sekolah di luar zona yang menawarkan fasilitas lebih baik. Oleh karena itu, rekomendasi penting dalam evaluasi ini adalah meningkatkan fasilitas sekolah, memperkuat kualitas layanan pendidikan, serta mengadopsi strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap SMPN 3. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik sekolah dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan zonasi.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan antara kedua sekolah tersebut adalah, kedua sekolah melaksanakan kebijakan zonasi sama-sama berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 untuk pemerataan pendidikan. Kemudian Perbedaannya adalah SMPN 1 Terbanggi Besar memiliki lokasi yang lebih strategis dan fasilitas memadai, ini mendukung daya tarik masyarakat. Sebaliknya, SMPN 3 Gunung Sugih menghadapi tantangan lokasi terpencil dan keterbatasan fasilitas, sehingga kebijakan zonasi belum efektif meningkatkan minat pendaftar.

Maka jika dilihat dari konteks geografis, kualitas fasilitas, dan persepsi masyarakat dapat disimpulkan hal ini menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan zonasi di kedua sekolah tersebut.

## 2. Aspek Input pada Kebijakan Sistem Zonasi

### a. SMPN 1 Terbanggi Besar

Berdasarkan teori evaluasi input yang mana teori evaluasi input adalah pendekatan evaluasi yang menilai kesiapan sumber daya atau komponen awal dalam suatu program atau kebijakan sebelum implementasi (Igant Erisza Maudyna, Erny Roesminingsih, & Karwanto, 2023). Fokus teori ini adalah pada ketersediaan dan kualitas input seperti kebijakan, prosedur, tenaga kerja, fasilitas, teknologi, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi input bertujuan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik sehingga program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana (Ina Magdalena, Deis Ayu Nur Hidayah, 2024). Dalam hal dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 1 Terbanggi Besar, terkait kesiapan input cukup baik, dengan fasilitas seperti ruang kelas dan perlengkapan pendukung yang memadai. Penggunaan aplikasi PPDB online meningkatkan transparansi, dan panduan pendaftaran telah disediakan meski perlu perbaikan agar lebih mudah dipahami. Tenaga pendidik berkualitas serta pembebasan biaya pendaftaran menunjukkan dukungan terhadap akses pendidikan yang inklusif. Namun, ada kebutuhan peningkatan sarana seperti ruang tambahan seiring bertambahnya siswa.

Selain itu, berdasarkan teori evaluasi input juga menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang sejalan dengan kebutuhan kebijakan zonasi. Di SMPN 1 Terbanggi Besar, selain ruang kelas tambahan, diperlukan penguatan fasilitas lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi untuk mendukung pembelajaran. Input dalam bentuk pelatihan tenaga pendidik juga menjadi komponen krusial untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengelola siswa dengan beragam latar belakang (Bahri, 2022). Perencanaan anggaran yang tepat serta komitmen manajemen sekolah dalam mempersiapkan input ini akan memastikan pelaksanaan kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

### b. SMPN 3 Gunung Sugih

Berdasarkan teori evaluasi input yang mana teori evaluasi input adalah pendekatan evaluasi yang menilai kesiapan sumber daya atau komponen awal dalam suatu program atau kebijakan sebelum implementasi (Igant Erisza Maudyna et al., 2023). Fokus teori ini adalah pada ketersediaan dan kualitas input seperti kebijakan, prosedur, tenaga kerja, fasilitas, teknologi, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi input bertujuan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik sehingga program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana (Igant Erisza Maudyna et al., 2023). Dalam hal dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih, terkait evaluasi input belum memadai untuk mendukung kebijakan zonasi secara optimal. Fasilitas terbatas mengurangi daya tarik sekolah, dibandingkan sekolah lain yang lebih lengkap. Buku pedoman dinilai kurang spesifik sehingga kurang membantu wali murid. Prosedur PPDB mengikuti juknis pemerintah, tetapi kurangnya strategi khusus membuat banyak kursi kosong, menunjukkan daya tarik rendah.

Dalam kerangka teori evaluasi input, kurangnya kesiapan SMPN 3 Gunung Sugih dalam mendukung kebijakan zonasi juga mencerminkan perlunya penguatan pada aspek teknologi dan anggaran. Misalnya, penggunaan sistem PPDB online yang lebih interaktif dan *user-friendly* dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pendaftaran sekaligus memberikan kemudahan akses bagi wali murid (Fakhriza Ardafie Raihan & Yuyun Yuningsih, 2024). Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitas sekolah seperti ruang kelas tambahan, laboratorium, dan perpustakaan modern akan menjadi input penting untuk meningkatkan daya tarik sekolah (Daulay, Fitriani, & Ningsih, 2022). Perencanaan input yang lebih komprehensif, termasuk pengadaan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menghadapi tantangan zonasi, dapat memastikan bahwa kebijakan ini berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Keduanya mematuhi ketentuan zonasi 90% sesuai Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Namun, SMPN 1 dengan akreditasi A memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang lebih memadai, sedangkan SMPN 3 dengan akreditasi C menghadapi keterbatasan tenaga pengajar dan sarana. Solusi bagi SMPN 3 adalah peningkatan fasilitas, panduan lebih spesifik, dan strategi menarik minat siswa.

### **3. Aspek proses kebijakan sistem zonasi**

#### **a. SMPN 1 Terbanggi Besar**

Analisis berdasarkan teori evaluasi proses, evaluasi proses adalah penilaian terhadap bagaimana suatu kebijakan atau program dilaksanakan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap rencana, prosedur, dan jadwal yang ditetapkan, (Dongoran et al., 2023) tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan desain awal, mengidentifikasi hambatan atau ketidaksesuaian, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program di lapangan (Suryani, Ni Kadek, 2020). Dalam hal pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 1 Terbanggi Besar, pelaksanaan sistem zonasi berjalan lebih efektif. Sosialisasi kepada calon siswa dan wali murid telah dilakukan, meskipun pemahaman masyarakat terhadap prosedur masih perlu ditingkatkan. Proses administrasi dan verifikasi data memakan waktu dan membutuhkan pengawasan ketat, tetapi koordinasi tim telah berjalan baik, dalam pengelolaan rombongan belajar, kapasitas kelas dioptimalkan dengan prosedur yang jelas, termasuk pengalihan siswa atau penambahan kelas jika diperlukan. Namun, keberagaman karakter siswa akibat penerimaan berbasis zonasi memengaruhi persepsi orang tua terhadap kualitas sekolah. Selain itu, teori evaluasi proses menyoroti pentingnya identifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 1 Terbanggi Besar. Salah satu tantangan utama adalah perlunya waktu yang lebih efisien dalam proses administrasi dan verifikasi data, yang saat ini masih memerlukan pengawasan intensif (Sawir, 2024). Hambatan ini menunjukkan perlunya adopsi teknologi yang lebih canggih untuk mempercepat proses tanpa mengurangi akurasi data. Di sisi lain, meskipun koordinasi tim telah berjalan dengan baik, perlunya pelibatan lebih aktif dari masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan ini menjadi kunci keberlanjutan (Lesna Nainggolan, Teovani Lodan, & Salsabila, 2023). Dengan demikian, evaluasi proses dapat menjadi landasan untuk memperbaiki mekanisme operasional kebijakan, sehingga pelaksanaannya tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan lokal.

#### **b. SMPN 3 Gunung Sugih**

Analisis berdasarkan teori evaluasi proses, evaluasi proses adalah penilaian terhadap bagaimana suatu kebijakan atau program dilaksanakan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap rencana, prosedur, dan jadwal yang ditetapkan (Dongoran et al., 2023). tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan desain awal, mengidentifikasi hambatan atau ketidaksesuaian, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program di lapangan (Dongoran et al., 2023). Dalam hal pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 3 Gunung Sugih, meskipun prosedur pelaksanaan telah sesuai aturan, efektivitasnya kurang optimal. Rendahnya minat masyarakat menyebabkan jumlah pendaftar sedikit, yang dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap fasilitas dan kualitas sekolah. Upaya promosi yang dilakukan belum cukup menarik minat, dan keterbatasan pemahaman orang tua terhadap pendaftaran online menambah kendala. Panitia PPDB membantu proses pendaftaran, tetapi pendampingan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan sistem zonasi. Dalam konteks ini, meskipun prosedur pelaksanaan sudah sesuai aturan, efektivitas kebijakan zonasi terhambat oleh beberapa faktor; Pertama, rendahnya minat masyarakat yang menyebabkan sedikitnya jumlah pendaftar menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan kenyataan yang ada di sekolah. Persepsi negatif terhadap fasilitas dan kualitas sekolah menjadi faktor utama yang memengaruhi minat orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah tersebut (Pratikno, 2021). Hal ini dapat mengindikasikan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap kualitas fasilitas dan

layanan yang diberikan oleh SMPN 3 Gunung Sugih, serta strategi promosi yang lebih efektif untuk mengubah persepsi masyarakat. Selain itu, upaya promosi yang dilakukan oleh sekolah dinilai belum cukup efektif dalam menarik minat masyarakat, meskipun telah ada promosi, pendekatan yang digunakan mungkin belum mampu menjawab kebutuhan informasi atau keyakinan yang diharapkan oleh orang tua calon siswa. Oleh karena itu sangat penting untuk merancang promosi yang lebih tepat sasaran dan lebih menarik perhatian, dengan memanfaatkan media sosial atau kanal informasi yang lebih akrab bagi masyarakat.

Keterbatasan pemahaman orang tua terhadap pendaftaran online juga menjadi hambatan signifikan dalam proses ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam pemahaman teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran (Mannayong, S, & Faisal, 2024). Dalam hal ini, peran panitia PPDB yang membantu proses pendaftaran sangat penting, namun untuk memastikan proses ini lebih efektif, perlu ada pendampingan yang lebih intensif. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan atau sosialisasi tentang cara menggunakan sistem online dengan cara yang mudah dipahami, sehingga masyarakat lebih siap dan percaya diri dalam mengikuti proses pendaftaran.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan antara Kedua sekolah yaitu keduanya sama-sama mengikuti prosedur PPDB sesuai juknis Permendikbud, termasuk pengumuman terbuka, seleksi, dan daftar ulang tanpa biaya. Kemudian Perbedaannya adalah SMPN 1 lebih efektif berkat dukungan fasilitas dan transportasi, sedangkan SMPN 3 terkendala daya tarik dan aksesibilitas.

Secara umum, kedua sekolah telah menjalankan proses PPDB sesuai dengan juknis, termasuk pengumuman terbuka, seleksi, dan daftar ulang tanpa biaya. Namun, SMPN 1 lebih unggul dalam efektivitas pelaksanaan karena dukungan fasilitas dan transportasi yang memadai, sementara SMPN 3 terkendala daya tarik dan aksesibilitas. Untuk meningkatkan efektivitas di SMPN 3, diperlukan peningkatan fasilitas, strategi promosi yang lebih baik, serta pendampingan kepada masyarakat.

## **4. Aspek Produk Kebijakan Sistem Zonasi**

### **a. SMPN 1 Terbanggi Besar**

Analisis dengan menggunakan teori evaluasi produk, evaluasi produk adalah metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan program, atau produk berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan, serta dampak yang dihasilkannya pada para pemangku kepentingan (Al-faruq, 2023). Dalam hal ini kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMPN 1, kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan. Sistem ini meningkatkan keberagaman siswa dan memudahkan orang tua dalam akses pendidikan, meski demikian masih terdapat tantangan dalam menerima siswa berprestasi dari luar zona. Untuk menjaga keseimbangan akses dan kualitas, proporsi jalur prestasi diusulkan untuk ditingkatkan. Evaluasi berkelanjutan dianggap penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, sistem zonasi ini berkontribusi pada pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, meskipun sistem zonasi sudah mencapai keberhasilan dalam beberapa aspek, tantangan tetap ada, terutama dalam menerima siswa berprestasi dari luar zona. Kebijakan zonasi yang memfokuskan penerimaan siswa berdasarkan kedekatan geografis menyebabkan siswa berprestasi yang berada di luar zona kesulitan untuk diterima di sekolah-sekolah yang dianggap memiliki kualitas tinggi (Widyastuti, 2020). Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam kesempatan akses bagi siswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun tidak berada dalam zona yang sama dengan sekolah tersebut. Untuk menjaga keseimbangan antara akses pendidikan yang merata dan kualitas pendidikan, ada usulan untuk meningkatkan proporsi jalur prestasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa berprestasi untuk diterima di sekolah yang mereka inginkan, sekaligus mempertahankan tujuan awal dari kebijakan zonasi, yaitu pemerataan pendidikan, dalam rangka menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan ini, evaluasi

berkelanjutan menjadi sangat penting. Melakukan evaluasi secara berkala akan memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan agar kebijakan zonasi tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan. Evaluasi juga membantu memastikan bahwa dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal kebijakan, serta memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan, terutama siswa dan orang tua (Zuanda, Fahrezi, Rised, & Syaifuddin, 2024).

#### **b. SMPN 3 Gunung Sugih**

Analisis dengan menggunakan teori evaluasi produk, evaluasi produk adalah metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan program, atau produk berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan, serta dampak yang dihasilkannya pada para pemangku kepentingan (Al-faruq, 2023). Dalam hal ini kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMPN 3, kebijakan zonasi belum sepenuhnya berhasil menarik minat siswa, terutama karena kualitas fasilitas dan program pendidikan yang dinilai kurang memadai oleh masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap mutu pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Profil siswa yang didominasi oleh keluarga kurang mampu juga menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu lebih sensitif terhadap konteks sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan mungkin telah mencapainya dalam hal pemerataan geografis, namun belum sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosial dan ekonomi siswa (Setiawan et al., 2024). Keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi sering kali lebih memilih sekolah dengan kualitas yang lebih tinggi, namun mereka terhalang oleh faktor biaya dan aksesibilitas. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu, misalnya dengan memberikan dukungan tambahan dalam bentuk beasiswa atau peningkatan fasilitas yang mendukung pembelajaran siswa dari keluarga kurang mampu (Dalla & Kewuel, 2023).

Oleh karena itu, meskipun kebijakan zonasi di SMPN 3 memiliki potensi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, keberhasilannya dalam menarik minat siswa sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas pendidikan dan fasilitas yang dianggap kurang memadai oleh masyarakat. Evaluasi lebih lanjut dan perbaikan terhadap kualitas pendidikan dan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan sangat penting agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan.

Kesamaan kedua sekolah adalah keberhasilan mereka dalam menerapkan sistem zonasi sesuai aturan, meskipun hasil penerimaan siswa bervariasi. SMPN 1 berhasil memenuhi kapasitas siswa dengan rasio optimal, sementara SMPN 3 masih menghadapi kendala daya tarik dan belum memenuhi standar nasional pendidikan. Peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan zonasi di masa depan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pada aspek konteks, SMPN 1 Terbanggi Besar dan SMPN 3 Gunung Sugih sudah sesuai dengan tujuan kebijakan sistem zonasi dalam menjalankan kebijakan zonasi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.
2. Evaluasi pada aspek input, kedua sekolah dalam proses penerimaan peserta didiknya sama-sama mematuhi jalur zonasi dengan ketentuan 90% siswa berasal dari zona terdekat sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2018. Kemudian evaluasi input yang menonjol pada kedua sekolah tersebut adalah SMPN 1 memiliki sumber daya manusia (guru) lebih berkualitas dengan akreditasi A, sedangkan SMPN 3 terbatas dalam jumlah tenaga pengajar dan fasilitas, serta memiliki akreditasi C.
3. Evaluasi pada aspek proses, kedua sekolah sama-sama menerapkan prosedur PPDB sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dalam Permendikbud. Pada implementasi kebijakan di SMPN 1 berjalan

- lebih efektif dengan dukungan sistem transportasi dan daya tampung yang memadai, sementara lain halnya di SMPN 3 yang terkendala minimnya akses transportasi dan daya tarik sekolah.
4. Evaluasi pada aspek produk, Kedua sekolah menunjukkan hasil penerimaan siswa dengan data kuantitatif mengenai jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian SMPN 1 berhasil memenuhi kapasitas dengan rasio siswa optimal, sementara SMPN 3 mengalami kesulitan menarik jumlah siswa sehingga belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan.

## REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Al-faruq, Z. (2023). Peran Penggunaan Desain Evaluasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.58569/ilma.v1i2.587>
- Arif, S. (2020). Pola Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di SMPN dan SMAN Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 17(2), 127–148. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i2.3526>
- Bahri, S. (2022). Meningkatkan Kualitas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Melalui Sumber Daya Manusia di Era Pandemi. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i1.158>
- Cahyo Hasanudin, Wagiran, S. (2021). Evaluasi Perkuliahan Daring Keterampilan Menulis Selama Masa Pandemi Covid-19 Dengan Model Evaluasi CIPP. *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, 8(2), 27–38.
- Cintya Lauren, C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>
- Daulay, S. H., Fitriani, S. F., & Ningsih, E. W. (2022). Pengaruh Fasilitas Sekolah terhadap Kemampuan dan Motivasi Belajar Siswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3731–3738. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2553>
- Dongoran, F. R., Naddya, A., Nuraini, N., Aisah, N., Susanti, S., & Ridho, A. M. (2023). Monitoring dan Evaluasi terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMP Terpadu Al-Farabi Tanjung Selamat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 5(1), 1891–1898. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11238>
- Fakhriza Ardafie Raihan, & Yuyun Yuningsih. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Pada Smp Pelita Kabupaten Bogor. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), 57–69. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.352>
- Fernanda, R., Susanti, P., Saputri, S. Y., Majestica, A., Farid, & Farras, M. (2024). Strategi Pengajaran Di Pedesaan : Jurnal Pengabdian Di Desa Pukur, Kec. Air Napal , Bengkulu Utara. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 5(3).
- Hayanuddin, H., Parawangi, A., & Syukri. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sman 4 Wajo. *Jurnal Unismuh*, 5, 65–77.
- Igant Erisza Maudyna, Erny Roesminingsih, & Karwanto. (2023). Evaluasi Kesiapan Pendidik dalam Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 637–648. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.322>
- Ina Magdalena, Deis Ayu Nur Hidayah, D. K. A. (2024). Evaluasi Program Ppdb Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Model CIPP. *Cendekia Pendidikan*, 3(1), 1–13.
- Lesna Nainggolan, E., Teovani Lodan, K., & Salsabila, L. (2023). Menuju Keberlanjutan Lingkungan: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kota Batam. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 179–188. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13584>

- Mannayong, J., S. M. R., & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 51–72.
- Pratikno, H. (2021). Persepsi Orangtua Terhadap Penentuan Sekolah Bilingual Jenjang Paud Dan Sd Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 2549–8371. <https://doi.org/10.29313/ga>
- Rizki, A. S., Rafi Aurelian, Ela Liana, Nur Afifah Fadhilah, & Rianasari Bimanti Esthi. (2024). Berbagi Pengetahuan mengenai Berbicara Perubahan dalam Organisasi melalui Webinar Pengabdian kepada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun*, 4(2), 35–42. <https://doi.org/10.36728/tm.v4i2.3903>
- Rizky Lestari, C., Fahmy, Z., & Laily Kusuma Wati, M. (2024). Tinjauan Holistik Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di UIN Walisongo. *Pendekatan Inovatif dengan Model CIPP*, 12(1), 179–192.
- Rudi Maryati, S. U. R. (2023). Evaluasi Program Sekolah Penggerak Menggunakan Model Cipp Di Sma Negeri Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Journal Of Social Science Research*, 3, 238–249.
- Sawir, M. (2024). Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Mempercepat Good Governance dalam Pelayanan Investasi di Papua. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(2), 30–41. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i2.512>
- Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah, Ahmad, & Widyatmike. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(4).
- Suryani, Ni Kadek, dan J. E. F. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Tinjauan Praktis Aplikatif*. Bali: Nilacakra.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- Wulakada, H. H. (2024). Disparitas Mutu Pendidikan Di Wilayah Perbatasan ( Refleksi Masyarakat Pinggiran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur ). *Seminar Nasional PENDIDIKAN GEOGRAF*, 2(2), 119–139.
- Zuanda, S., Fahrezi, D. W., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27207–27218.